

## ABSTRAK

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) harus dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Akan tetapi, kenyataannya pelaksanaan UN ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pelaksana pendidikan di tingkat kota, sub rayon, satuan pendidikan dan ruang ujian. Oleh sebab itu, harus adanya sistem pengawasan yang objektif, berkeadilan dan jujur.

Masalahnya adalah Bagaimana Sistem Pengawasan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas. Adapun tujuannya untuk mengetahui, menganalisis: Sistem Pengawasan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas di Sub Rayon Bandung Barat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Wehrich (1990:196-197) yang menyatakan bahwa proses dasar pengendalian, dimanapun penerapannya atau apa saja yang diawasi, meliputi tiga langkah: (1) menetapkan standar, (2) mengukur prestasi kerja, (3) memperbaiki dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki dari standar dan perencanaan. Metoda yang digunakan Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode ini, maka informasi yang didapatkan lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian ini adalah Pertama, sistem pengawasan dilakukan mulai rayon Kota Bandung, Sub Rayon, Satuan Pendidikan, dan Ruangan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh TPI tingkat Kota Bandung belum menyentuh masalah substansial baru menyangkut masalah adminsitratif. Hal ini terlihat karena pengawas dibatasi oleh prosedur-prosedur yang baku. Perosedur tersebut dilakukan dan dibuat oleh pemerintah pusat melalui BSNP. Hal ini belum mengawasi masalah penggandaan soal-soal UN, pengawasan diluar pelaksanaan UN yang melibatkan media massa. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas silang/pengawas ruang yang dilakukan selama ini masih dibatasi oleh 'kekuasaan' kepala sekolah melalui K3S di Sub Rayon Bandung Barat, yang membatasi laporan pengawas ruang kepada media atau pemerintah terhadap kecurangan-kecurangan yang ada di sekolah. Keempat, kecurangan ini adalah sebagai sebuah sistem mulai dari kepala sekolah, panitia UN, Guru mata pelajaran dan siswa sebagai peserta UN untuk berusaha meluluskan peserta didik lulus UN 100%. Kesimpulan Sistem Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengawas Independen (TPI) dari tingkat Rayon Kota Bandung, Sub Rayon, dan Tingkat Satuan Pendidikan dan ruang ujian oleh pengawas silang yang berasal dari sekolah-sekolah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh TPI masih sebatas adminsitratif belum menyentuh masalah substantif, yaitu pengukuran kualitas peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL).

**Kata Kunci: Sistem, Pengawasan, Ujian Nasional, Pendidikan.**

## ABSTRACT

*Implementation National Examination (UN) must behavior of objective, justice, and akuntable. This is for increase education quality in school. About UN truth have a problem must education implementation in city level, suddistrict, school, and examination room. Because, have there controlling system whith objective, justice, fair.*

*The problem how controlling system national examination senior high school. The purpose for understand, analysis: controlling system national examination senior high school, study in subdistrict Bandung Barat Kota Bandung academic year 2011/2012.*

*This reseach is based on theory of Wehrich (1990:1997) basic proces controlling, were ever it's takes or anything is include step (1) standarized, (2) measure of performance work, (3) refair and correcting deviation from standarized and planning.*

*Method of this research based on purpose, so this research used qualitative methode, methode qualitative research is suitable for this purpose of research because the information more complete deepest and believed.*

*The first product research, controlling system attitude at firs district city Bandung, subdistrict, school, and walk room already appropriate with prosedur. Second, attitude contrloll with TPI level Bandung City not touch a problem new substantial new relevant problem administative. Thing visible controll limit with standard prosedur. Mention prosedur attitude and make with past centre goverment BSNP. Thing problem controll quetion multiple UN, controll out realitation involve in mass media. Third, attitude controll cross/room is during stile burder of power head school with K3S in subdistrict West Bandung, the past report room controll to media or government about corruption with school. Fourth, corruption is a system similar begin with head school, comittee UN. lesson teacher and student participant similar UN for try release participant educate.*

*Conclusion controlling system mentioned impelementation with team independen controll (TPI) from phase district city Bandung, subdistrict, school, and room examiniation with cross supervisor from school appropriate maintain prosedur. Controll attitude from TPI past still administative not touce problem substantive, is quality measuring educate eggree with release standar competence (SKL).*

**Keywords: System, Controlling, National Examination, Education.**